

Wakil Ketua KPK Sebut Ada yang Bocorkan OTT, Pelaku Sulit Diungkap

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menduga ada pihak yang sengaja membocorkan informasi yang mengakibatkan operasi tangkap tangan (OTT) gagal.

KPK telah menyadap begitu banyak nomor telepon. Jumlahnya bahkan tidak kurang jika dibanding dengan penyadapan di periode-periode sebelumnya.

Alex mengatakan hal ini pada acara diskusi Pemberantasan Korupsi: Refleksi dan Harapan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Saya sampaikan tadi, dari OTT tidak kurang loh nomor Hp yang kita sadap itu. Tapi kebocoran (Informasi) ada," kata Alex, Selasa (2/4).

Kebocoran informasi rahasia di KPK itu menjadi persoalan yang sampai sekarang belum juga teratasi.

Kebocoran informasi semacam itu sudah terjadi sejak periode kepemimpinan 2015-2019. Namun, pelakunya belum juga terungkap.

"Itu pun terjadi di periode pertama saya dan sampai sekarang itu juga

belum teratasi dengan baik siapa yang membocorkan kalau kita akan melakukan OTT-OTT dan lain sebagainya," ujar Alex.

Kasus kebocoran informasi rahasia itu berimbas pada jumlah OTT yang menjadi semakin sedikit, meskipun penanganan perkara secara umum tidak kalah banyak dibanding periode sebelumnya.

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu menyatakan, persoalan kebocoran ini bakal menjadi evaluasi bagi KPK.

"Untuk memperbaiki dan bagaimana manajemen penanganan perkara karena ini menjadi perhatian masyarakat," tutur Alex.

Sebagai informasi, dalam beberapa waktu belakangan KPK disebut jarang menggelar OTT. Kasus terakhir yang diungkap dengan OTT adalah penangkapan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba pada 18 Desember 2023, kemudian kasus pemotongan insentif PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada 25 Januari 2024. ● han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



BAZAR RAMADHAN TNI JELANG IDUL FITRI

Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua TNI Tandyo Budi Revita (kiri), Wakasal Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma (kedua kanan), dan Wakasau Marsdya TNI Andyan Martono Putra (kanan) membuka acara Bazar TNI dalam rangka Idul Fitri 1445 Hijriah, atau Mesra TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (2/4). Bazar TNI digelar serentak di markas-markas TNI yang tersebar di 38 provinsi yang berlangsung 2-3 April 2024.

Empat Menteri Tak Perlu Izin dari Jokowi untuk Bersaksi di MK

Pemerintah menghormati langkah MK memanggil sejumlah menteri yang dibutuhkan untuk memberi keterangannya dalam sidang sengketa PHPU.

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil empat menteri dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024.

Keempat menteri itu yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Menanggapi itu, Stafus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, bahwa keempat menteri tersebut tidak perlu lagi meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk bersaksi di MK.

"Tidak perlu. Karena MK memang dapat memanggil

siapapun yang dianggap perlu didengar keterangannya," kata Dini dalam keterangannya, Selasa (2/4).

Dini mengungkapkan bahwa Pemerintah menghormati panggilan MK pada sejumlah menteri yang dibutuhkan keterangannya dalam sidang sengketa PHPU.

"Pemerintah berharap dengan kehadiran sejumlah menteri tersebut, MK dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh terkait latar belakang dan implementasi kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil empat menteri dalam persidangan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. MK menganggap pemanggilan itu diperlukan.

"Kemudian juga kepada para pihak juga perlu disampaikan hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi," ucap Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan PHPU di Gedung MK, Senin (1/4/2024).

"Berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Menko Perekonomian, Sri Mulyani Menteri Keuangan, Tri Rismaharini Menteri Sosial, dan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," tambah dia.

Suhartoyo mengungkapkan, pemanggilan tersebut masuk dalam kategori yang

penting didengar MK, bukan berarti MK mengakomodir permohonan pemohon 1 Anies-Muhaimin, atau pemohon 2 Ganjar-Mahfud.

"Karena sebagaimana diskusi universalnya badan pera-

dilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya, nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta salah satu pihak," ungkap Suhartoyo. ● han

Jaksa yang Diduga Peras Saksi Rp3 M Sudah Dikembalikan ke Kejagung

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata memastikan bahwa oknum Jaksa yang diduga memeras saksi sebanyak Rp3 miliar, sudah dikembalikan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Pasti akan kami komunikasikan, apalagi yang bersangkutan kan sebenarnya sudah ada surat pengembalian karena sudah lebih dari sepuluh tahun. Sekarang sudah di Kejaksaan," kata pria yang kerap disapa Alex itu kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Selasa (2/4).

Pengembalian itu tidak ada kaitannya dengan dugaan perkara tersebut. Ia menuturkan, pengembalian itu sudah dilakukan sejak Maret lalu.

"Kalau dari catatan sih enggak ada kaitannya. Kan enggak menghalangi juga, sekalipun yang bersangkutan sudah ditugaskan kembali di instansi asalnya, ketika KPK nanti akan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi kan enggak ada persoalan juga. Cuma hanya memang perlu koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung," ungkapnya.

"Mungkin sebulan terak-

hir apa, SK (Surat Keputusan) pengembaliannya belum lama kok," jelas dia.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho membenarkan bahwa pihaknya menerima laporan dugaan oknum Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeras saksi mencapai Rp3 miliar. Setelah diproses secara prosedur operasional baku (POB) Dewas KPK, kemudian laporan masyarakat tersebut diteruskan ke Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan.

Tidak lupa, Albertina juga meneruskan dengan tembusan ke Pemimpin KPK. "Setelah diproses sesuai POB di Dewas, sudah diteruskan dengan nota dinas tanggal 6 Desember 2023, ke Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku, dengan tembusan ke pimpinan KPK," kata Albertina melalui pesan singkat kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (29/3/2024).

"Info terakhir yang diperoleh Dewas telah di Lidik dan LHKPN," ujarnya. ● me

Pangdam XVII Sebut Sangat Mudah untuk Hancurkan KKB dalam Sekejap

JAKARTA (IM) - Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtns, masih disandra kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Upaya pembebasannya hingga kini masih dalam proses. Pemerintah tetap mengedepankan negosiasi untuk membebaskan Warga Negara Selandia Baru tersebut.

Seperti diketahui disandra KKB sejak 7 Februari 2023, atau sekitar 1 tahun 3 bulan.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan mengatakan, pembebasan Kapten Philip yang disandra kelompok Egianus Kogoya bukanlah perkara sulit.

Pasukan TNI bisa saja menggunakan kekuatan senjata untuk membebaskan sandera, namun tidak dilakukan karena mengedepankan negosiasi.

"Kami punya kemampuan. Kalau saya ingin membebaskan dia (Pilot Susi Air) dengan kekuatan senjata, dengan kekuatan pasukan tidak sulit bagi saya," tegas Mayjen Izak melansir akun Instagram

@infokomando, dikutip Selasa (2/4).

Jenderal TNI bintang dua ini menegaskan, TNI sangat mampu melakukan pembebasan sandera dengan cepat. Pasalnya, kekuatan KKB di Papua tidak sebanding dengan TNI.

"Kalau pembebasan sandera, TNI sangat mampu untuk membebaskan sandera ini, sangat mampu. Kami punya kekuatan kami punya segala-galanya untuk membebaskan sandera ini, kami bisa bebaskan dengan cepat tidak butuh waktu lama," ujar Mayjen Izak.

Namun kata Izak, pasukan TNI tetap memperhitungkan keselamatan sandera sebelum melakukan penindakan tegas.

"Tapi yang kami perhitungkan di sini, akan muncul korban-korban yang tidak perlu, korban masyarakat, korban terutama sandera sendiri berisiko," ujarnya.

"Sehingga kami memilih jalan negosiasi agar semua bisa berjalan baik tanpa ada korban," tutup mantan Kaskogabwilhan III tersebut. ● me



IDN/ANTARA

DISKUSI PEMBERANTASAN KORUPSI KE DEPAN DI KPK

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) bersama Pansel Capim KPK 2015-2019 Betti Alisjahbana (kanan) dan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (kiri) menyampaikan paparan saat diskusi publik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/4). Diskusi publik tersebut bertema Pemberantasan Korupsi Refleksi dan Harapan yang membahas mengenai tantangan KPK ke depan.

PAN Usung Khofifah di Pilkada Jatim, Sambut Baik Jika PDI-P Ikut Dukung

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan, PAN adalah partai pertama yang mengusung Khofifah Indar Parawansa untuk maju di Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2024. PAN sudah merekomendasikan Khofifah sejak beberapa bulan lalu.

"PAN adalah partai pertama yang telah memberikan rekomendasi Pilkada Jawa Timur kepada Ibu Khofifah beberapa bulan yang lalu," ujar Eddy saat dimintai konfirmasi, Selasa (2/4).

Sementara PDI-P, disebut masih sedang melakukan penajakan untuk mendukung Khofifah di Pilkada Jatim. PAN siap bekerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mendukung Khofifah.

"PAN selalu siap bekerja sama dengan teman-teman parpol untuk memenangkan kontestasi Pilkada 2024," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo turut menegaskan, PAN sebagai partai pertama yang mengusung Khofifah untuk Pilkada

Jatim 2024. Dia menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sudah menyampaikan surat kepada Khofifah secara terbuka dalam acara konsolidasi caleg PAN se-Jatim di Surabaya pada 4 Desember 2023 lalu.

Jika ada partai lain yang ingin ikut mengusung Khofifah di Pilkada Jatim, PAN akan menyambut baik. Dradjad menekankan pihaknya juga akan menyambut baik partai pendukung Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo.

"Saya yakin akan banyak parpol yang mengusung Mbak Khofifah. Kinerjanya bagus, komunikasi personal sangat akrab, rakyat pendukungnya juga sangat banyak," katanya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan disebut sedang melakukan penajakan dengan Khofifah Indar Parawansa sebagai bakal calon Gubernur Jatim pada Pilkada Jatim 2024.

Menurut Ketua DPD PDI-Perjuangan Jatim, Said Abdullah, penajakan untuk mengkomunikasikan bagaimana visi PDI-Perjuangan dan Khofifah untuk membangun Jatim 5 tahun ke deoan.

"Kami sudah bertemu dengan Ibu Khofifah untuk saling melakukan penajakan," katanya kepada wartawan, Minggu (31/3) malam.

Sebagai mantan gubernur yang sudah 5 tahun memimpin Jatim, PDI-Perjuangan sangat respek dengan pencapaian pembangunan. ● han

Ahli Hukum Tata Negara Yakin MK Bisa Tangani Pelanggaran TSM Diluar UU Pemilu

JAKARTA (IM) - Ahli hukum tata negara, Charles Simabura meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menangani kasus pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang berada di luar Undang-Undang Pemilu.

Charles menjelaskan, dalam undang-undang pemilu hanya mengatur dua bentuk pelanggaran TSM. Diantaranya mengatur politik uang atau *money politics* dan pelanggaran administrasi pemilu.

"Namun faktanya di dalam persidangan mahkamah beberapa putusan, baik pemilu-lukada maupun juga pilpres, mahkamah telah memeriksa pelanggaran TSM di luar yang diatur dalam undang-undang pemilu," kata Charles saat menjadi ahli dari pihak

Capres-cawapres 03 Ganjar-Mahfud di sidang MK, Selasa (2/4).

Charles menyebut bahwa pada sengketa Pilpres 2019, MK dalam perkara nomor 1/PHPU-Pres/XVII/2019 telah memeriksa pelanggaran TSM di luar yang telah diatur di dalam undang-undang, meskipun tidak terbukti.

"Jadi bukan persoalan mahkamah menyatakan dia tidak berwenang menangani pelanggaran TSM tersebut, tapi lebih kepada tidak terbukanya pelanggaran tersebut," kata Charles.

Charles mengungkapkan pelanggaran TSM yang diperiksa antara lain terkait dengan ketidaknetralan aparaturnegara disebutkan di situ polisi dan intelijen; diskriminasi

dan penyalahgunaan hukum; penyalahgunaan birokrasi dan BUMN; penyalahgunaan APBN; penyalahgunaan anggaran BUMN, pembatasan media pers; DPT yang tidak masuk akal; kecacauan Situs KPU dalam kaitannya dengan DPT; serta dokumen C7 secara sengaja dihilangkan di berbagai daerah.

"Artinya ada 9 dalil pelanggaran TSM yang pada waktu itu pemilu 2019 disampaikan oleh para pemohon yang diperiksa oleh mahkamah. Sekali lagi meskipun itu tidak terbukti, tapi mahkamah meneguhkan dan menyatakan bahwa mahkamah berwenang untuk mengadili pelanggaran TSM di luar dua ketentuan undang-undang tadi," ungkapnya. ● me

IDN/ANTARA



PDI PERJUANGAN GUGAT KPU KE PTUN

Ketua tim hukum PDIP Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di PTUN, Jakarta Timur, Selasa (2/4). Gugatan tersebut ditujukan kepada KPU, terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden.

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 01 April 2024 No. 179, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. SURYA CITRA INDO, berkedudukan di Jakarta Barat. Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi
PT. SURYA CITRA INDO